

POTRET DEMOKRASI JAWA BARAT 2016



<https://jabar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

POTRET DEMOKRASI JAWA BARAT 2016



POTRET DEMOKRASI JAWA BARAT 2016

ISSN/ISBN : 2655-1209
Katalog BPS : 4601007.32
No. Publikasi : 32520.1708

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 31 Halaman

Naskah :

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Barat

Penyunting :

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar Kover :

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Barat

Diterbitkan oleh :

BPS Provinsi Jawa Barat

Dicetak oleh :

CV.Filindo

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

POTRET DEMOKRASI JAWA BARAT 2016

Tim Penyusun

- Penanggung Jawab Umum : Ir. Dody Herlando, M.Econ
- Penanggung Jawab Teknis : Ir. Gandari Adianti Aju Fatimah, M.Si
- Penulis & Pengolah Data : Esti Suciningtyas Pratiwi, S.ST
- Penyunting/Editor : 1. Yayat Hidayat, S.ST, M.Stat.
2. Nani Komalasari, SE

KATA PENGANTAR

Sejak tahun 2007, Pemerintah mulai mencoba mengukur perkembangan demokrasi di tiap Provinsi. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Setelah melakukan berbagai penyempurnaan, pada tahun 2010 dilaksanakan kembali penghitungan IDI 2009 yang akhirnya disepakati menjadi *benchmark* penyusunan IDI berikutnya. Sejak tahun 2009, BPS ditunjuk sebagai koordinator pengumpulan data dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Setiap tahunnya IDI disusun untuk melihat dinamika demokrasi di setiap Provinsi di Indonesia. Untuk itu, BPS Provinsi Jawa Barat menyusun publikasi tentang potret demokrasi dengan judul "Potret Demokrasi Jawa Barat 2016".

Diharapkan publikasi ini dapat memberikan informasi yang akan berguna bagi perencanaan pembangunan politik di Jawa Barat serta menambah pemahaman tentang potret demokrasi di Provinsi Jawa Barat. Semoga bermanfaat.

Bandung, November 2017

Kepala,



Dody Herlando

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Sistematika Penulisan	2
2. METODOLOGI	3
2.1 Aspek, Variabel dan Indikator IDI	3
2.2 Metode Pengumpulan Data	6
2.3 Tahapan Penghitungan IDI	9
3. POTRET DEMOKRASI JAWA BARAT 2013 – 2016	11
3.1 Gambaran Umum Demokrasi Jawa Barat 2016	11
3.1.1 Aspek Kebebasan Sipil	14
3.1.2 Aspek Hak-hak Politik	16
3.1.3 Aspek Lembaga Demokrasi	18
3.2 Dinamika Demokrasi di Jawa Barat Tahun 2013 – 2016	20
3.2.1 Nilai IDI Jawa Barat Tahun 2013 – 2016	20
3.2.2 Aspek Kebebasan Sipil IDI Jawa Barat Tahun 2013–2016..	22
3.2.3 Aspek Hak-hak Politik IDI Jawa Barat Tahun 2013–2016...	25
3.2.4 Aspek Lembaga Demokrasi IDI Jawa Barat 2013–2016.....	27
4. PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Aspek, Variabel dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia..	3
Tabel 2.2	Makna Nilai IDI	10
Tabel 3.1	Skor Indikator pada Aspek Kebebasan Sipil IDI Jawa Barat Tahun 2013 - 2016	24
Tabel 3.2	Skor Indikator pada Aspek Hak-hak Politik IDI Jawa Barat Tahun 2013 - 2016	27
Tabel 3.3	Skor Indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi IDI Jawa Barat Tahun 2013 - 2016	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tahapan Penghitungan IDI	10
Gambar 3.1	Peringkat IDI 2016 menurut Provinsi di Indonesia	12
Gambar 3.2	Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Tahun 2016	13
Gambar 3.3	Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2016	15
Gambar 3.4	Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Hak-hak Politik Tahun 2016	17
Gambar 3.5	Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Lembaga Demokrasi Tahun 2016	19
Gambar 3.6	Nilai IDI Jawa Barat dibandingkan IDI Nasional Tahun 2013 - 2016	20
Gambar 3.7	Dinamika Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Tahun 2013 - 2016	21
Gambar 3.8	Dinamika Nilai Indeks Variabel Jawa Barat dalam Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2013 - 2016	23
Gambar 3.9	Dinamika Nilai Indeks Variabel Jawa Barat dalam Aspek Hak-hak Politik Tahun 2013 - 2016	25
Gambar 3.10	Dinamika Nilai Indeks Variabel Jawa Barat dalam Aspek Lembaga Demokrasi Tahun 2013 - 2016	28

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengukuran demokrasi sering menjadi topik hangat di kalangan akademik serta pemerhati dan praktisi pembangunan dalam dua dasawarsa terakhir ini. Adanya gelombang demokratisasi global, telah menggeser era non demokratik berbagai negara di dunia menjadi rejim demokratik. Tidak terkecuali Indonesia yang juga mengalami transisi demokrasi besar-besaran yang sering disebut big bang transition. Indonesia dengan berbagai keragaman serta variasi antar daerah yang sangat lebar, menjadikan Indonesia harus mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di tingkat daerah. Hal ini penting karena keberhasilan sebagai negara demokratik akan sangat tergantung pada sejauh mana demokrasi itu berkembang dan diterapkan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Oleh karena itu, Indonesia memerlukan suatu alat ukur yang bisa menggambarkan perkembangan demokrasi di masing-masing daerah. Selain itu di RPJPN juga dituliskan bahwa Bappenas membuat perencanaan yang dapat memperkuat konsolidasi demokrasi. Untuk itu, diperlukan suatu pengukuran demokrasi yang komprehensif dan obyektif yang dituangkan dalam bentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Keberadaan pengukuran seperti ini diharapkan dapat mendorong kompetisi yang sehat dan berbagi pengalaman di antara pemerintah daerah serta menyediakan data yang terkait dengan ranah pembangunan demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) ini dibuat untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi berdasarkan pelaksanaan dan

perkembangan sejumlah aspek demokrasi. Indeks ini disusun dari 3 aspek demokrasi yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Hak-hak Politik (Political Right) dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Ketiga aspek demokrasi tersebut dijabarkan menjadi 11 variabel dan 28 indikator. Data IDI ini mengacu pada tingkat provinsi karena data yang dikumpulkan merupakan data di tingkat provinsi dan bukan pada tingkat nasional. IDI yang disusun ini menggunakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di ibukota provinsi yang bersangkutan sebagai sumber data.

1.2. Maksud dan Tujuan

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran mengenai kondisi demokrasi di Provinsi Jawa Barat serta untuk memperoleh secara lengkap gambaran mengenai aspek, variabel dan indikator demokrasi sebagai penentu nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Diharapkan data ini dapat bermanfaat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam hal kehidupan berdemokrasi.

1.3. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, dalam publikasi ini akan disajikan dalam 4 bab yang disusun secara sistematis.. Bab I menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. Bab II menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia. Bab III akan mengulas Potret Demokrasi Jawa Barat 2013 – 2016. Dan Bab IV adalah penutup.

2.1. Aspek, Variabel dan Indikator IDI

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI dibangun dari tiga aspek yang terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator. Tiga aspek komponen IDI terdiri atas Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi. Seluruh aspek, variabel dan indikator yang membentuk IDI dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Aspek, Variabel dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia

A. KEBEBASAN SIPIL (<i>CIVIL LIBERTIES</i>)		Sumber Data
I. Kebebasan berkumpul dan berserikat		
1	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	<i>Review</i> Surat Kabar
2	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	<i>Review</i> Surat Kabar
II. Kebebasan berpendapat		
3	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	<i>Review</i> Surat Kabar
4	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	<i>Review</i> Surat Kabar

III. Kebebasan berkeyakinan		
5	Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	<i>Review Dokumen</i>
6	Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	<i>Review Surat Kabar</i>
7	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	<i>Review Surat Kabar</i>
IV. Kebebasan dari diskriminasi		
8	Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	<i>Review Dokumen</i>
9	Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	<i>Review Surat Kabar</i>
10	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	<i>Review Surat Kabar</i>
B. HAK-HAK POLITIK (<i>POLITICAL RIGHTS</i>)		
V. Hak Memilih dan Dipilih		
11	Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	<i>Review Dokumen</i>
12	Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	<i>Review Dokumen</i>
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	<i>Review Dokumen</i>

14	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)	<i>Review Dokumen</i>
15	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi	<i>Review Dokumen</i>
VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan		
16	Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok	<i>Review Surat Kabar</i>
17	Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	<i>Review Surat Kabar</i>
C. LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (<i>DEMOCRATIC INSTITUTIONS</i>)		
VII. Pemilu yang bebas dan adil		
18	Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	<i>Review Dokumen</i>
19	Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	<i>Review Dokumen</i>
VIII. Peran DPRD		
20	Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita	<i>Review Dokumen</i>
21	Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	<i>Review Dokumen</i>
22	Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif	<i>Review Dokumen</i>
IX. Peran Partai Politik		
23	Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	<i>Review Surat Kabar dan Dokumen</i>

24	Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	<i>Review Dokumen</i>
C. LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS)		
X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah		
25	Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif	<i>Review Dokumen</i>
26	Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif	<i>Review Dokumen</i>
XI. Peran Peradilan yang Independen		
27	Jumlah keputusan hakim yang kontroversial	<i>Review Surat Kabar</i>
28	Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	<i>Review Surat Kabar</i>

2.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan IDI, data dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan, kuantitatif dan kualitatif. Dua metode tersebut dikombinasikan dengan rancangan tertentu sehingga data yang diperoleh dari metode yang satu akan melakukan validasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Untuk itu, ada empat tahapan pengumpulan data IDI yaitu *Review Surat Kabar*, *Review Dokumen*, *Focus Group Discussion (FGD)* dan *Wawancara Mendalam (In-depth Interview)*. Seluruh tahapan ini dilakukan dengan merujuk pada indikator-indikator yang disusun dari turunan tiga aspek demokrasi.

Review Surat Kabar

Review surat kabar termasuk dalam pengumpulan data kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan variabel dan indikator penelitian melalui analisis isi (content analysis) bahan-bahan tertulis maupun simbolik. Pemilihan surat kabar yang digunakan berdasarkan :

- Oplah terbesar di masing-masing provinsi
- Independensi
- Kontinuitas

Adapun surat kabar yang dipakai dalam penyusunan IDI Jawa Barat tahun 2013 – 2016 adalah Harian Pikiran Rakyat.

Review Dokumen

Sama seperti review surat kabar, review dokumen juga termasuk rujukan data kuantitatif. Objek dari review dokumen ini berupa dokumen publik, yaitu dokumen yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dan atau masyarakat di masing-masing provinsi. Dokumen-dokumen tersebut berupa :

- Peraturan Daerah yang masih berlaku
- Surat Keputusan Kepala Daerah dan atau DPRD
- Surat Edaran
- Surat Perintah
- Laporan
- Catatan
- Lainnya

Responden utama dari review dokumen ini adalah Sekretariat DPRD, Bappeda, Biro Hukum, KPU, Kesbangpol, Polda dan Partai Politik.

Focus Group Discussion (FGD)

Ada tiga kata kunci yang digunakan dalam *Focus Group Discussion*, yaitu : diskusi (bukan wawancara), kelompok (bukan individu) dan terfokus (bukan bebas). Dengan demikian, secara harfiah, metode *Focus Group Discussion* (FGD) dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan data mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Tiga alasan utama metode FGD digunakan dalam penyusunan IDI : pertama, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif yang telah berhasil dikumpulkan melalui review surat kabar dan dokumen. Kedua, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan indikator IDI. Ketiga, menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review surat kabar dan dokumen.

Peserta yang diundang dalam FGD IDI ini adalah pemangku kepentingan dalam membangun demokrasi yaitu unsur pemerintahan, DPRD, akademisi, keamanan, media, buruh, mahasiswa dan partai politik. Peserta yang hadir diharapkan mereka yang mengetahui tentang kejadian-kejadian terkait demokrasi. FGD dilaksanakan selama dua hari, hari pertama membahas tentang aspek kebebasan sipil, sedangkan hari kedua tentang aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi.

Wawancara Mendalam

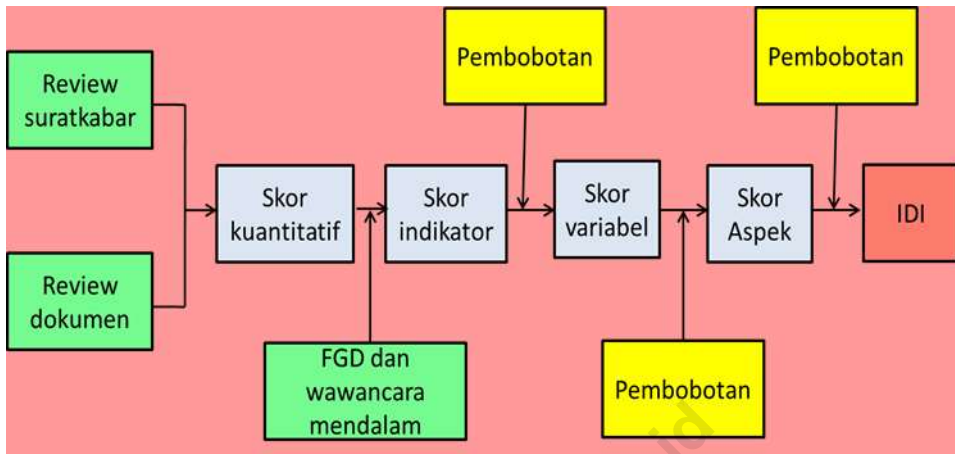
Wawancara mendalam dalam kaidah penelitian ilmiah, juga termasuk kategori teknik pengumpulan data kualitatif. Pada konteks penyusunan IDI, *in-depth interview* digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui review surat kabar, dokumen maupun FGD. Wawancara mendalam diperankan sebagai pelengkap dari ketiga metode lainnya.

Dengan peran seperti ini, wawancara mendalam dilaksanakan setelah FGD berlangsung guna mendalami berbagai informasi terkait kasus-kasus yang belum terungkap secara maksimal dalam FGD. Narasumber terpilih harus benar-benar yang memiliki pengalaman dan pengetahuan luas tentang indikator IDI. Lebih dari itu, wawancara mendalam juga berperan sebagai “filter” dalam mengurangi bias informasi berkaitan dengan aspek, variabel dan indikator IDI.

2.3. Tahapan Penghitungan IDI

Penghitungan indeks untuk masing-masing indikator IDI ditetapkan dengan bertumpu pada data kuantitatif yang diperoleh melalui dua metode yang pertama (review surat kabar dan review dokumen) serta data kualitatif yang diperoleh melalui dua metode berikutnya (FGD dan wawancara mendalam). Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Pada akhirnya komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Secara singkat, operasionalisasi dari empat metode pengumpulan data dalam penyusunan IDI, dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Tahapan Penghitungan IDI



Skor indikator diperoleh dari Intensitas Indikator x Bobot Lokal Indikator x Bobot Lokal Variabel x Bobot Aspek. Pembobotan dilakukan oleh tim peneliti sedangkan intensitas diperoleh melalui AHP dengan skala yang berbeda-beda dengan range tertentu dan dikelompokkan dengan memberikan atribut nilai tertentu misalnya: 0 s/d 4.

Makna Nilai IDI

Untuk menggambarkan capaian kinerja demokrasi di setiap provinsi, digunakan skala 0-100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi. Kinerja terendah atau nilai indeks = 0 secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 1).

Tabel 2.2. Makna Nilai IDI

Nilai IDI	Makna
< 60	kinerja demokrasi rendah
60 – 80	kinerja demokrasi sedang
> 80	kinerja demokrasi tinggi



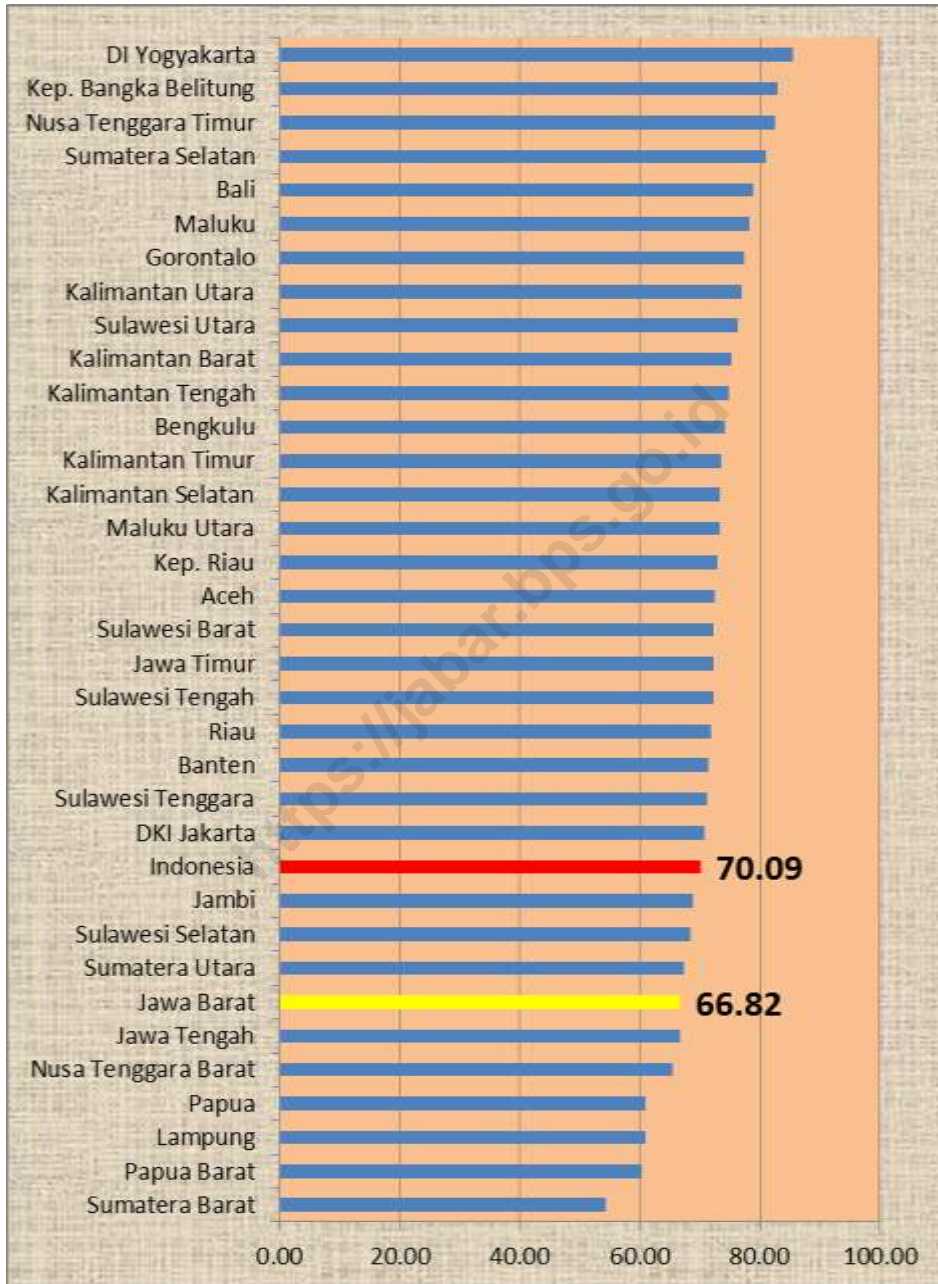
POTRET DEMOKRASI JAWA BARAT 2013 - 2016

3.1. Gambaran Umum Demokrasi Jawa Barat 2016

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 merupakan Indeks Demokrasi Indonesia yang disusun untuk ke-sembilan kalinya sejak indeks serupa (IDI 2007) dihasilkan pada tahun 2008. Selanjutnya IDI 2009 disepakati menjadi *benchmark* penyusunan IDI berikutnya. Sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas di Indonesia, keberadaan IDI sangat bermanfaat karena melalui IDI ini keadaan demokrasi di masing-masing provinsi di Indonesia dapat digambarkan dengan jelas.

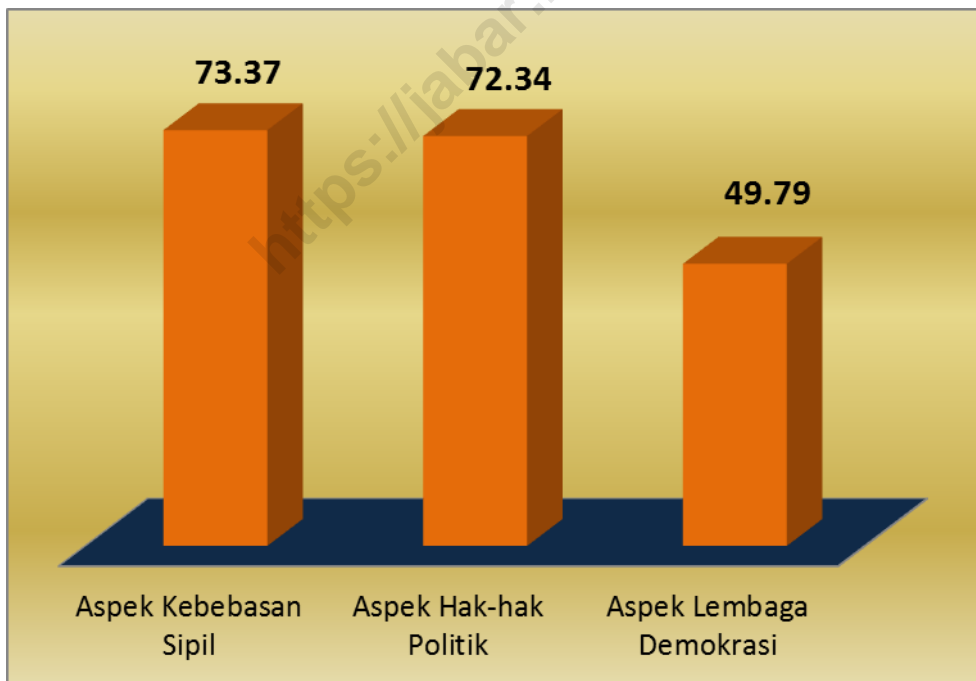
Berdasarkan capaian IDI, pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi dapat memberikan prioritas pembangunan politik pada indikator tertentu yang mempunyai indeks rendah. Di sisi lain, pemerintah dapat memelihara kondisi demokrasi terkait dengan indikator yang mempunyai nilai indeks tinggi. Untuk kepentingan inilah IDI disusun guna membantu pemerintah khususnya pemerintah provinsi di dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik. Namun demikian, tingkat demokrasi di suatu daerah bukan hanya menggambarkan kinerja pemerintah daerah saja tetapi juga menggambarkan perilaku pemangku kepentingan lainnya.

Gambar 3.1. Peringkat IDI 2016 menurut Provinsi di Indonesia



Pada tahun 2016, IDI Jawa Barat sebesar 66,82 lebih rendah dari nilai IDI Nasional yang tercatat sebesar 70,09. Secara peringkat dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, IDI Jawa Barat menempati posisi ke-28. Provinsi DI Yogyakarta menempati peringkat tertinggi yaitu dengan IDI sebesar 85,58 sementara peringkat terendah adalah Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 54,41. Terdapat 4 provinsi yang mempunyai kinerja demokrasi katagori kinerja demokrasi baik, sementara provinsi lainnya masuk dalam katagori kinerja demokrasi sedang dan rendah. Secara umum, sebagian provinsi mengalami kenaikan nilai kinerja demokrasi jika dibandingkan keadaan tahun 2015. Secara rinci, urutan peringkat IDI Provinsi se Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.2 Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Tahun 2016

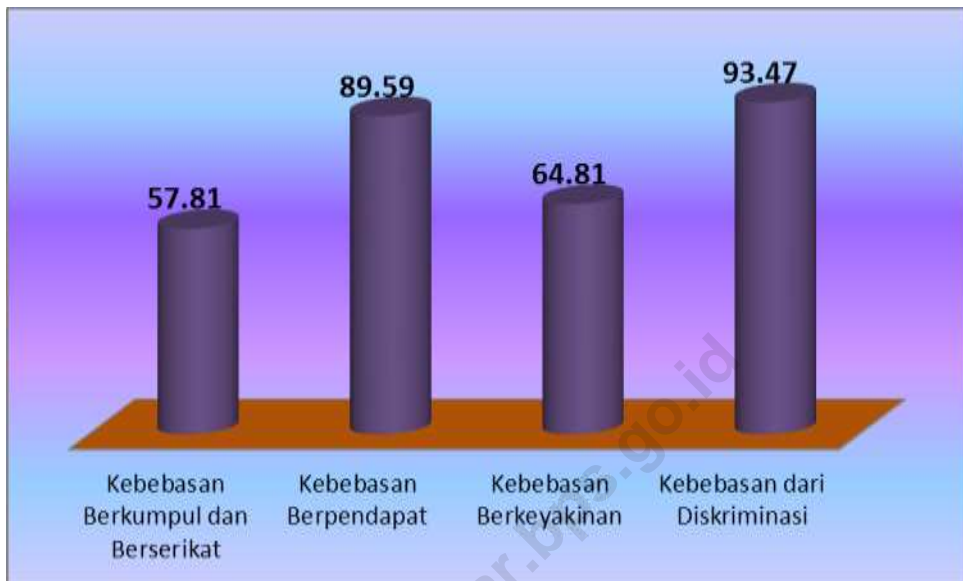


Jika dilihat menurut aspek yang membentuk IDI Jawa Barat tahun 2016, dapat dilihat pada gambar 3.2 adanya kesenjangan yang cukup lebar dari ketiga aspek tersebut. Capaian aspek Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik mempunyai kinerja sedang yaitu masing-masing sebesar 73,37 dan 72,34. Sedangkan untuk aspek Lembaga Demokrasi berada pada kinerja yang rendah dengan capaian 49,79. Dengan demikian, dapat dikatakan aspek Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kondisi demokrasi di Jawa Barat tahun 2016. Selain itu, dari ketiga aspek tersebut, aspek Lembaga Demokrasi memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja demokrasi di Jawa Barat.

3.1.1 Aspek Kebebasan Sipil

Nilai indeks aspek Kebebasan Sipil dihasilkan dari agregasi indeks empat variabel yang dimiliki yaitu: (1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, (2) Kebebasan Berpendapat, (3) Kebebasan Berkeyakinan dan (4) Kebebasan dari Diskriminasi. Secara keseluruhan, kinerja demokrasi per variabel dalam aspek kebebasan sipil menunjukkan kinerja demokrasi yang baik. Untuk variabel Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan dari Diskriminasi sudah berada pada kinerja yang baik yakni masing-masing mencapai 89,59 dan 93,47. Untuk variabel Kebebasan Berkeyakinan ada pada kinerja sedang dengan 64,81. Dan variabel dalam aspek Kebebasan Sipil yang berada pada kinerja yang rendah adalah Kebebasan Berkumpul dan Berserikat yang hanya mencapai 57,81. Secara rinci bisa dilihat pada gambar 3.3.

Gambar 3.3 Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2016



Tingginya capaian indeks kebebasan berpendapat dan kebebasan dari diskriminasi memperlihatkan bahwa pemerintah maupun masyarakat menjamin adanya kebebasan untuk berpendapat dan bebas dari perlakuan diskriminasi. Namun demikian, masih ada kejadian yang mencederai demokrasi di Jawa Barat tahun 2016, yaitu adanya beberapa kejadian dimana aparat pemerintah ataupun masyarakat masih menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat masyarakat lainnya serta masih ada yang menghambat kebebasan berkeyakinan.

Kejadian-kejadian yang mencederai demokrasi di Jawa Barat pada variabel kebebasan berkumpul dan berserikat pada tahun 2016, di antaranya masih adanya pelarangan berbagai kegiatan yang diadakan masyarakat oleh aparat setempat. Sebagai contoh, terdapat kejadian pelarangan oleh aparat terhadap komunitas perpustakaan jalanan. Selain itu

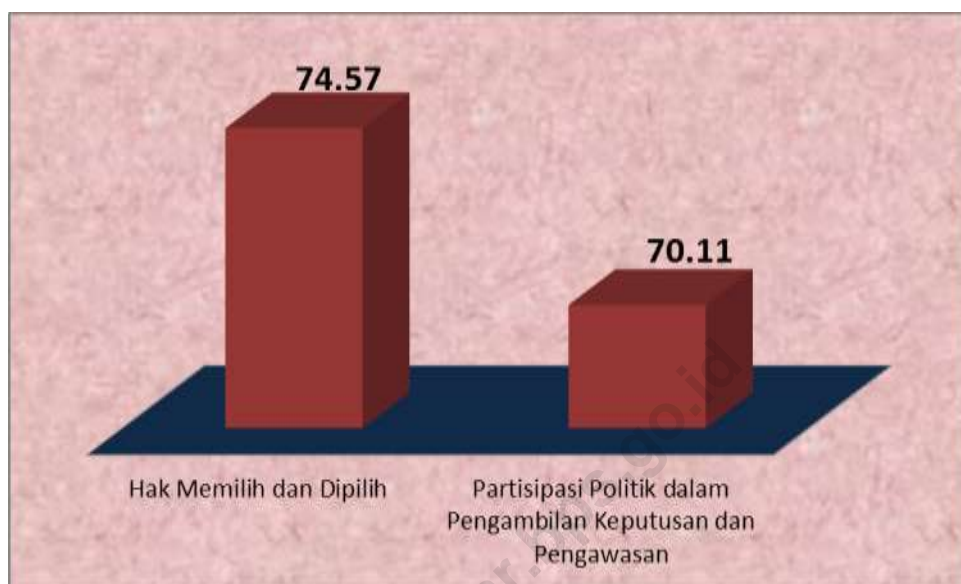
ada juga pelarangan sebuah diskusi tentang lintas agama oleh sejumlah ormas.

Rendahnya nilai variabel kebebasan berkeyakinan di Jawa Barat tahun 2016 juga dikarenakan beberapa kejadian. Di antaranya, kejadian pembubaran KKR di Sabuga Bandung oleh sejumlah ormas, kemudian penyegelan Mesjid milik JAI di Sukabumi, dan sebagainya. Selain itu adanya peraturan baik peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang mewajibkan seseorang untuk menjalankan keyakinannya. Masalah keyakinan adalah masalah yang sangat pribadi terkait dengan hubungan antara manusia dengan sang pencipta. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi pelaksanaan keyakinan setiap warga negaranya.

3.1.2 Aspek Hak-hak Politik

Aspek Hak-hak Politik dibangun dari variabel hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Capaian indeks variabel hak memilih dan dipilih sebesar 74,57 menunjukkan bahwa kinerja demokrasi pada variabel ini masuk dalam katagori sedang. Variabel Hak memilih dan dipilih terkait dengan pelaksanaan pemilu legislatif 2014 seperti kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang, tingkat partisipasi pemilih serta adanya hambatan terhadap hak memilih dan dipilih. Di samping itu, keterwakilan perempuan di DPRD juga mempengaruhi capaian indeks variabel ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 3.4.

Gambar 3.4 Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Hak-hak Politik Tahun 2016



Variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dibentuk dari 2 indikator yaitu jumlah demonstrasi yang bersifat kekerasan dan penyampaian pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2016, pengaduan yang disampaikan melalui surat kabar cukup banyak. Sebagian besar pengaduan adalah tentang infrastruktur. Tidak adanya pembatasan terhadap pengaduan masyarakat menunjukkan kondisi yang sangat demokratis. Namun di sisi lain, unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat banyak yang berakhir dengan kekerasan. Hal inilah yang menurunkan nilai demokrasi pada variabel ini. Perpaduan nilai indeks dari 2 indikator pada variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menyebabkan capaian indeks pada variabel ini mencapai 70,11.

3.1.3 Aspek Lembaga Demokrasi

Variabel yang tercakup dalam aspek lembaga demokrasi adalah pemerintah, DPRD, Partai Politik, birokrasi pemerintah daerah, lembaga yang terkait peradilan. Masing-masing lembaga berperan dalam menciptakan kehidupan yang demokratis. Peran Pemerintah dan Lembaga Penyelenggara Pemilu terkait dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. DPRD disorot dalam pelaksanaan 3 fungsi utamanya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Partai Politik berperan dalam melaksanakan kaderisasi dan besaran keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai. Birokrasi pemerintah daerah fokus pada kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh PTUN dan upaya penyediaan informasi APBD. Sementara itu peran lembaga yang terkait peradilan akan dilihat dari keputusan-keputusan yang kontroversial dan penghentian penyidikan yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Peran-peran masing-masing lembaga digambarkan dalam 5 variabel yaitu (1) Pemilu yang Bebas dan Adil; (2) Peran DPRD; (3) Peran Partai Politik; (4) Peran Birokrasi Pemerintah Daerah; dan (5) Peran Peradilan yang Independen.

Hampir seluruh variabel dalam aspek Lembaga Demokrasi menunjukkan kinerja demokrasi "rendah", hanya satu variabel yang menunjukkan kinerja demokrasi "baik" yaitu variabel Peran Peradilan yang Independen.

Gambar 3.5 Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Lembaga Demokrasi Tahun 2016



Dari gambar 3.5 dapat dilihat bahwa capaian indeks variabel Peran Peradilan yang Independen relatif tinggi yaitu mencapai 100,00. Hal ini menandakan bahwa peran peradilan yang independen di Jawa Barat sudah baik. Hal ini bisa juga diartikan bahwa di Jawa Barat tidak ada keputusan hakim dan penghentian penyidikan oleh jaksa atau polisi yang bersifat kontroversial.

Adapun keempat variabel lainnya dalam aspek Lembaga Demokrasi yaitu Pemilu yang bebas dan adil, Peran DPRD, Peran partai politik dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah berada dalam kategori rendah. Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2014 ternyata menyisakan berbagai masalah yang mengakibatkan nilai variabel ini rendah. DPRD juga dirasakan belum menjalankan fungsinya secara optimal. Anggaran yang ditetapkan untuk kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan masih belum sesuai dengan batas minimal yang ditetapkan oleh UU. Lemahnya fungsi legislasi

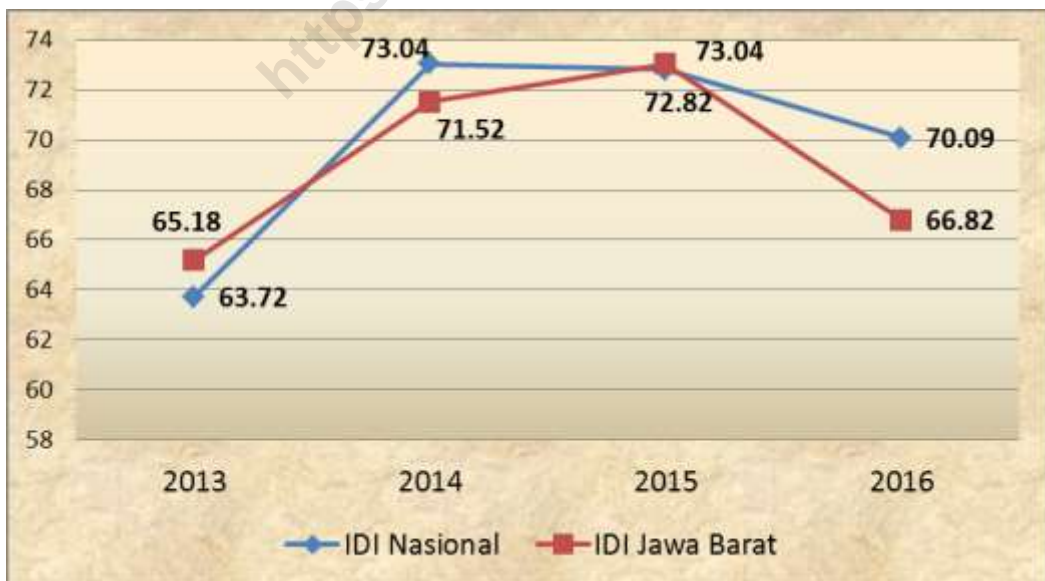
yang dijalankan DPRD ditandai dengan sedikitnya perda inisiatif DPRD yang dihasilkan. Selain itu, fungsi pengawasan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dengan belum optimalnya rekomendasi yang diberikan oleh DPRD kepada lembaga eksekutif.

3.2. Dinamika Demokrasi di Jawa Barat Tahun 2013 - 2016

3.2.1. Nilai IDI Jawa Barat Tahun 2013 - 2016

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu manfaat IDI adalah dapat menunjukkan perkembangan tingkat demokrasi suatu wilayah dari tahun ke tahun. Kejadian-kejadian di suatu provinsi selama tahun tertentu dapat menaikkan atau menurunkan nilai IDI. Jadi nilai IDI tergantung dari skor masing-masing indikator selama kurun waktu satu tahun.

Gambar 3.6 Nilai IDI Jawa Barat dibandingkan IDI Nasional Tahun 2013 - 2016



Gambar 3.6 menyajikan dinamika IDI Jawa Barat selama periode 2013 - 2016 dimana fluktuasi IDI Jawa Barat arahnya hampir sama dengan IDI Nasional. Selama periode 2013 - 2016, IDI Jawa Barat berada di bawah angka IDI Nasional kecuali pada tahun 2015 yang nilainya lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Perbedaan yang cukup jauh terjadi pada tahun 2016 dimana IDI Jawa Barat hanya 66,82 sementara itu IDI Nasional mencapai 70,09. Walaupun nilai IDI Jawa Barat terjadi fluktuasi, namun secara keseluruhan selama kurun waktu 2013 - 2016, kinerja demokrasi di Jawa Barat masih termasuk kategori sedang.

Gambar 3.7 Dinamika Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Tahun 2013 - 2016



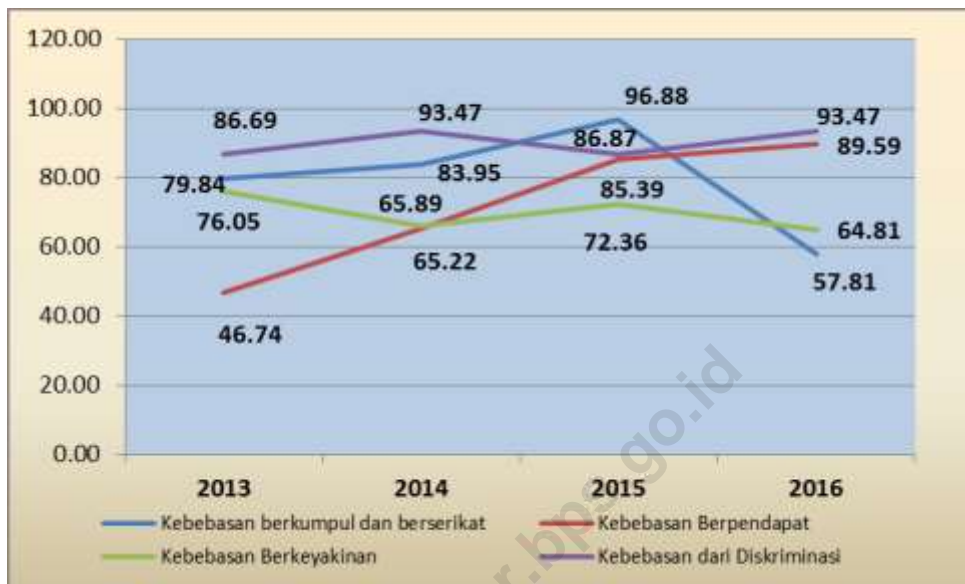
Gambar 3.7 menampilkan perkembangan ketiga aspek penyusun IDI, yaitu aspek Kebebasan Sipil, aspek Hak-hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi selama kurun waktu 2013 - 2016. Selama periode tersebut, capaian indeks aspek Kebebasan Sipil cukup fluktuatif tetapi cenderung stabil. Sementara itu, capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi menunjukkan penurunan dan selanjutnya relatif konstan. Adapun capaian indeks aspek Hak-hak Politik menunjukkan peningkatan sampai tahun 2015, dan setelah itu menurun pada 2016.

3.2.2. Aspek Kebebasan Sipil IDI Jawa Barat Tahun 2013 - 2016

Salah satu unsur penting dalam penegakan demokrasi adalah pemenuhan hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak kebebasan sipil dari semua warga Negara. Kebebasan pasti memiliki batasan, karena tidak ada kebebasan yang absolut. Hak kebebasan seseorang dibatasi oleh hak kebebasan orang lain. Kebebasan hanya bermakna jika diiringi tanggung jawab. Kebebasan dan tanggung jawab merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam demokrasi kebebasan seseorang tetap dibatasi oleh aturan yang disepakati bersama.

Nilai indeks aspek Kebebasan Sipil dibentuk dari komposit nilai indeks empat variabel yang terdapat didalamnya, yaitu variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berkeyakinan dan Kebebasan dari Diskriminasi. Gambar 3.8 menggambarkan sebaran nilai ke-empat variabel tersebut.

Gambar 3.8 Dinamika Nilai Indeks Variabel Jawa Barat dalam Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2013 – 2016



Indeks Kebebasan Sipil menunjukkan tren menurun, tetapi variabel yang menjadi penyebab turunnya indeks ini berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2014, terjadi peningkatan indeks pada variabel Kebebasan berserikat dan berkumpul, variabel Kebebasan Berpendapat dan variabel Kebebasan dari Diskriminasi dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013. Namun untuk variabel lainnya yaitu Kebebasan Berkeyakinan mengalami penurunan.

Pada tahun 2015, variabel kebebasan dari diskriminasi mengalami penurunan sekitar 6 poin jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan ketiga variabel yang lainnya mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2016, variabel Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan Diskriminasi mengalami peningkatan, sedangkan variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat serta variabel Kebebasan Berkeyakinan mengalami penurunan yang cukup tajam. Penurunan dua variabel ini disebabkan beberapa kejadian yang

terjadi di tahun 2016 diawali dari pelarangan sejumlah diskusi yang digelar di beberapa tempat sampai masih adanya penyegelan tempat ibadah dan pelarangan kegiatan keagamaan (gambar 3.8).

Tabel 3.1. Skor Indikator pada Aspek Kebebasan Sipil IDI Jawa Barat Tahun 2013 – 2016

No	Indikator	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat					
1	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00	100,00	62,50
2	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	90,00	75,00	25,00
Kebebasan Berpendapat					
3	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	100,00	100,00	87,50
4	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00	100,00	12,50	100,00
Kebebasan Berkeyakinan					
5	Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	65,22	65,22	60,87	60,87
6	Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya	100,00	100,00	100,00	81,25
7	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	90,00	100,00	100,00	70,00
Kebebasan dari Diskriminasi					
8	Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	83,33	83,33	66,67	83,33
9	Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	87,50	100,00	100,00	100,00
10	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	90,00	100,00	100,00	100,00

3.2.3. Aspek Hak-hak Politik IDI Jawa Barat Tahun 2013 - 2016

Aspek Hak-hak Politik mempunyai dua variabel yakni variabel Hak Memilih dan Dipilih serta variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Gambar 3.9 memperlihatkan capaian indeks variabel yang membentuk Aspek Hak-hak Politik. Selama kurun waktu 2013 - 2016, capaian indeks Variabel Hak Memilih dan Dipilih relatif konstan. Sementara itu, capaian indeks variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan mengalami peningkatan sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 dan mengalami penurunan yang cukup tajam pada 2016..

Gambar 3.9 Dinamika Nilai Indeks Variabel Jawa Barat dalam Aspek Hak-hak Politik Tahun 2013 – 2016



Indikator yang membentuk variabel hak memilih dan dipilih adalah Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat; Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih; Kualitas daftar pemilih tetap (DPT); Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) dan Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Selama periode 2013 – 2016, variabel memilih dan dipilih cenderung stabil (konstan). Sedangkan untuk variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan cukup fluktuatif. Hal ini bisa dilihat pada Tabel 3.2. Periode 2013 – 2015 terjadi peningkatan nilai indeks variabel ini, namun pada tahun 2016, terjadi penurunan yaitu dari 89,13 menjadi 70,11. Penurunan variabel ini lebih kepada penurunan indikator demonstrasi yang bersifat kekerasan yang merupakan salah satu pembentuk variabel ini yaitu dari 78,26 pada tahun 2015 menurun menjadi 40,22 pada tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh semakin banyaknya demonstrasi yang bersifat kekerasan yang terjadi Jawa Barat pada tahun 2016. Demonstrasi yang bersifat kekerasan umumnya dipicu oleh ketidakpuasan hasil Pilkada serta ketidakpuasan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2.

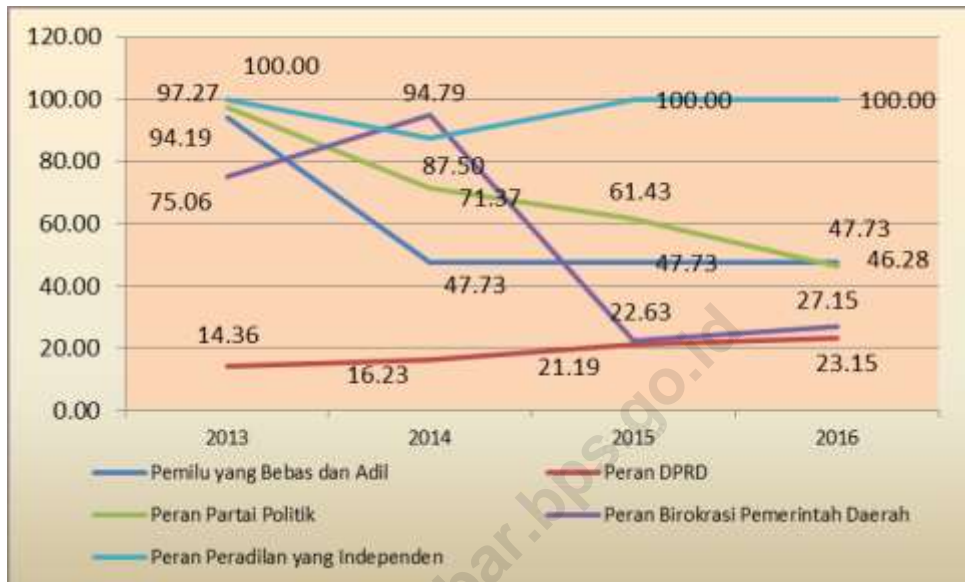
**Tabel 3.2. Skor Indikator pada Aspek Hak-hak Politik
IDI Jawa Barat Tahun 2013 – 2016**

No	Indikator	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hak Memilih dan Dipilih					
11	Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	30,77	74,36	74,36	74,36
12	Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	50,00	60,00	60,00	60,00
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	30,00	78,15	78,15	78,15
14	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)	73,11	71,39	71,39	71,39
15	Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota	83,33	73,33	73,33	73,33
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan					
16	Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	0,00	11,74	78,26	40,22
17	Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00	100,00	100,00

3.2.4. Aspek Lembaga Demokrasi IDI Jawa Barat 2013 - 2016

Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa Aspek lembaga-lembaga demokrasi terdiri dari lima variabel. Variabel yang terkait dengan Pemilu yaitu variabel Pemilu yang Bebas dan Adil yang merujuk pada Pemilu Legislatif 2014.

Gambar 3.10 Dinamika Nilai Indeks Variabel Jawa Barat dalam Aspek Lembaga Demokrasi Tahun 2013 – 2016



Gambar 3.10 memperlihatkan perkembangan capaian indeks pada variabel-variabel pembentuk Aspek Lembaga Demokrasi. Variabel Pemilu yang bebas dan adil, variabel Peran DPRD serta variabel Peran Peradilan yang Independen menunjukkan pola yang konstan. Peran Partai Politik menunjukkan kinerja yang kurang bagus sejak tahun 2013 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai indeks variabel ini dari tahun ke tahun. Pelaksanaan kaderisasi merupakan salah satu wujud menciptakan iklim demokrasi. Namun, pelaksanaan kegiatan kaderisasi oleh Partai masih sangat rendah. Ditengarai anggaran yang diberikan Pemerintah untuk Partai Politik masih rendah. Dan anggaran dari Pemerintah umumnya digunakan untuk mobilisasi anggota pada saat menjelang Pilkada. Disamping itu,

pemberian peluang kepada perempuan untuk menjadi pengurus partai mendorong kondisi yang demokratis.

Untuk variabel Peran Peradilan yang Independen, nilainya cenderung stabil (konstan). Begitu pula untuk variabel Peran DPRD yang cukup stabil. Perubahan yang cukup fluktuatif terjadi di variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan ada pergantian indikator pada tahun 2015, sehingga mengakibatkan nilai indeks variabel ini turun tajam pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2016, variabel ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan kurang lebih sebesar 5 poin tetapi masih dalam kategori rendah.

Sejak tahun 2013, secara umum hampir semua variabel yang membentuk aspek Lembaga Demokrasi menunjukkan kinerja yang sangat baik kecuali variabel Peran DPRD. Rendahnya capaian indeks Peran DPRD disebabkan karena DPRD belum melaksanakan fungsinya secara optimal. Telah disebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Pada tahun 2016, fungsi anggaran belum dioptimalkan sepenuhnya oleh DPRD. Capaian skor untuk alokasi anggaran terhadap pendidikan dan kesehatan hanya mencapai 29,47. Fungsi legislasi dengan indikator jumlah perda inisiatif hanya mencapai 15,38. Begitu pula fungsi pengawasan yang ditunjukkan oleh indikator jumlah rekomendasi pada eksekutif hanya mencapai nilai 7,14 (Tabel 3.3).

**Tabel 3.3. Skor Indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi
IDI Jawa Barat Tahun 2013 – 2016**

No	Indikator	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemilu Yang Bebas dan Adil					
18	Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	90,91	95,45	95,45	95,45
19	Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	97,47	0,00	0,00	0,00
Peran DPRD					
20	Persentase alokasi anggaran pendidikan thd total APBD	14,63	43,18	25,21	29,47
	Persentase alokasi anggaran kesehatan thd total APBD				
21	Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	23,95	0,00	16,67	15,38
22	Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif	6,25	10,71	10,71	7,14
Peran Partai Politik					
23	Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	100,00	71,43	57,14	42,86
24	Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	72,73	70,82	100,00	77,07
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah					
25	Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif	86,49	98,68		
	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN			0,00	0,00
26	Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif	63,64	90,91		
	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah			41,67	50,00
Peradilan yang Independen					
27	Jumlah keputusan hakim yang kontroversial	100,00	75,00	100,00	100,00
28	Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00	100,00	100,00

Variabel Peran Peradilan yang independen menunjukkan kinerja yang sangat baik sejak tahun 2013. Berdasarkan pengamatan dan data yang dihimpun, tidak ada kejadian penegakan hukum yang mencederai hati nurani masyarakat. Para penegak hukum telah menjalankan tugasnya dengan baik demi tegaknya demokrasi.

4

PENUTUP

Kondisi demokrasi di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2013 – 2016 menunjukkan adanya fluktuasi. Terciptanya suatu iklim demokrasi yang baik merupakan tanggung jawab bersama semua pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Provinsi, Pihak Keamanan, DPRD, Partai Politik, LSM, Ormas, Mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Pada tahun 2016, capaian IDI Jawa Barat termasuk dalam kategori sedang dengan nilai indeks sebesar 66,82. Angka ini lebih rendah dari nilai IDI Nasional yang tercatat sebesar 70,09.

Jika dilihat dari ketiga aspek penyusun IDI di Jawa Barat pada tahun 2016, ketiga aspek tersebut menunjukkan penurunan. Salah satu penyebab menurunnya indeks ini dikarenakan masih ada aparat maupun masyarakat yang menghambat aspek kebebasan sipil, seperti adanya larangan terhadap perpustakaan jalanan yang dilakukan oleh aparat, penyegelan tempat ibadah oleh aparat dan sejumlah ormas, dan sebagainya. Selain itu menurunnya nilai pada aspek Hak-hak Politik seperti jumlah demonstrasi yang bersifat kekerasan turut andil dalam penurunan angka IDI Jawa Barat. Untuk aspek Lembaga Demokrasi, salah satu penyebab menurunnya angka aspek ini diantaranya masih minimnya peran DPRD dalam menjalankan fungsinya yang ditandai dengan salah satunya sedikitnya perda inisiatif yang dihasilkan selama tahun 2016.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://jabar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan PHH. Mustafa No. 43, Bandung
Telp. (022) 7272595 – 7201696
<http://jabar.bps.go.id>

